

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Laboratorium Bank Syariah

##### 1. Pengertian Laboratorium

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Laboratorium adalah tempat untuk mengadakan percobaan (penyelidikan) segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia dan sebagainya.<sup>26</sup>

Laboratorium merupakan salah satu sarana pendukung penting, bersifat sangat strategis dalam kegiatan pelaksanaan sistem pendidikan, khususnya pada sistem pendidikan di perguruan tinggi. Secara umum, peran dan fungsinya adalah melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Menurut Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia mengatakan bahwa “Laboratorium adalah tempat untuk mengadakan percobaan (penyelidikan dan sebagainya) segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan sebagainya. Sedangkan laboran adalah orang (ahli ilmu kimia dan sebagainya) yang bekerja di Laboratorium”

Peraturan Mendikbud no 49 tahun 2014 menyebutkan secara tegas dalam pasal 31 bahwa Laboratorium merupakan salah satu standar prasarana pembelajaran. Masih dalam peraturan yang sama, berbeda

---

<sup>26</sup>KBBI. (2016). “Kamus Besar Bahasa Indonesia”.  
<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/laboratorium>, diakses pada 05 Maret 2020.

halnya Laboratorium tidak disinggung sama sekali pada bagian standar penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa fungsi Laboratorium perguruan tinggi sementara ini masih dimaknai sebagai tempat melakukan praktikum dan eksperimen pembelajaran semata. Dengan kata lain, makna Laboratorium sebagai sumber belajar lebih pada penggunaan Laboratorium sebagai tempat belajar (kuliah).<sup>27</sup>

Menurut Bamawi dan M. Arifin (2012) sarana pendidikan mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung menunjang proses pendidikan sedangkan prasarana pendidikan mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan. Oleh karena itu sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor yang wajib ada karena sangat penting dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kegiatan belajar Mengajar.

## **2. Pengertian Laboratorium Bank Syariah**

Laboratorium Bank Syariah merupakan sarana penunjang dan pelaksana program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk akselerasi perkembangan syariah di Indonesia.

Laboratorium Bank Syariah mempunyai dua fungsi yaitu sebagai bagian yang terintegrasi dari pendidikan dan pengajaran serta sebagai pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, dalam operasionalnya terdapat

---

<sup>27</sup>Peraturan Mendikbud No 49 Tahun 2014

mahasiswa yang ditugaskan untuk mengelola Laboratorium Bank Syariah sebagai pengurus atau yang ditugaskan magang untuk mengoperasikan Laboratorium Bank Syariah tersebut.

Tugas yang diberikan kepada mahasiswa pengelola Laboratorium Bank Syariah adalah tugas sebagai *Customer Service (CS)*, *Teller*, bagian pemasaran, bagian penghimpunan dana, bagian analisis pembiayaan dan lain sebagainya.

### **3. Fungsi Laboratorium Bank Syariah**

Laboratorium Bank Syariah mempunyai dua fungsi yaitu sebagai bagian yang terintegrasi dari pendidikan dan pengajaran serta sebagai pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, dalam operasionalnya terdapat mahasiswa yang ditugaskan untuk mengelola Laboratorium Bank Syariah sebagai pengurus atau yang ditugaskan magang untuk mengoperasikan Laboratorium Bank Syariah tersebut.

Tugas yang diberikan kepada mahasiswa pengelola Laboratorium Bank Syariah adalah tugas sebagai *Customer Service (CS)*, *Teller*, bagian pemasaran, bagian penghimpunan dana, bagian analisis pembiayaan dan lain sebagainya. Laboratorium Bank Syariah berfungsi sebagai wahana pengumpulan dana dari seluruh civitas akademika untuk kemudian disalurkan melalui pembiayaan kepada civitas akademika pula yang mengajukan produk pembiayaan.

Dengan demikian, Laboratorium Bank Syariah dapat menciptakan mahasiswa yang memiliki daya saing yang ke depannya dapat menjadi praktisi yang profesional.

Menurut kegunaannya, Laboratorium dibagi menjadi dua jenis yaitu Laboratorium pembelajaran (*classroom laboratory*) dan Laboratorium penelitian (*research laboratory*). Laboratorium pembelajaran didesain untuk proses belajar mengajar, praktikum dan kegiatan lain yang mendukung proses pembelajaran.<sup>28</sup>

Adapun fungsi Laboratorium antara lain:

- a. Sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus,
- b. Sebagai tempat yang mendorong semangat peserta didik untuk memperdalam pengertian suatu fakta yang diselidiki atau diamati,
- c. Tempat *display* atau pameran,
- d. Sebagai tempat untuk belajar memahami karakteristik alam dan lingkungan melalui optimalisasi keterampilan proses serta mengembangkan sikap ilmiah,
- e. Sebagai tempat berlatih menerapkan proses sesuai dengan tuntutan pembelajaran yang mengutamakan proses selain produk,
- f. Memberikan kelengkapan bagi mata kuliah teori yang diterima sehingga ada harmonisasi antara teori dan praktik.

---

<sup>28</sup>Hamdani & Kurniatanty, *Manajemen dan Teknik Laboratorium*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2008), hlm 28



## B. Literasi Keuangan

### 1. Pengertian Literasi keuangan

Istilah Literasi keuangan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengelola uang yang dimilikinya secara bijak baik dalam bentuk investasi maupun penyaluran ke bidang sosial. Lebih khusus lagi, mengacu pada seperangkat ketrampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan yang efektif terhadap investasinya agar dapat meningkatkan sumber daya keuangannya.<sup>29</sup>

Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.<sup>30</sup>

Tingkat literasi keuangan yang tinggi merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan bukan disebabkan dari pendapatan semata (rendahnya pendapatan), kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan seperti kesalahan penggunaan kredit, tidak adanya perencanaan keuangan dan tidak memiliki tabungan.

---

<sup>29</sup>Rike Setiawati, *Literasi Keuangan Islam (Suatu telaah Literatur*, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi (2013), hlm 1

<sup>30</sup>OJK 2017: *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017)*

Sehingga memiliki literasi keuangan yang tinggi merupakan hal vital untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera.<sup>31</sup>

Pentingnya literasi keuangan dalam membentuk keuangan syariah yang inklusif mengharuskan pengoptimalan pemahaman yang benar mengenai keuangan syariah khususnya Perbankan syariah kepada akademisi, ulama, dan da'i muslim akan berdampak signifikan bagi upaya literasi keuangan syariah. Mahasiswa menjadi salah satu target sasaran dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI).<sup>32</sup>

## 2. Tingkat Literasi Di Indonesia

Berdasarkan pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

a. *Well literate* (21,84 %),

Yaitu memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

---

<sup>31</sup>Akmal & Saputa, *Analisis Tingkat Literasi Keuangan*, JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), (2016), hlm 35

<sup>32</sup>Nuryana Fatati, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam*, "Literasi Keuangan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Madura Berdasarkan Demografi Sebagai Dasar Penguatan Kompetensi Program Studi", (2019), hlm 89

b. *Sufficient literate* (75,69%),

Yaitu memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

c. *Less literate* (2,06%)

Yaitu hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.

d. *Not literate* (0,41%),

Yaitu tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.<sup>33</sup>

Dari hasil survei nasional OJK pada tahun 2013 terhadap 8.000 responden dari 20 provinsi di Indonesia menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat secara umum sebesar 21,84%.

Survei yang sama dilakukan kembali tahun 2016 terhadap 9.680 responden di 34 provinsi di Indonesia menunjukkan adanya kenaikan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia yaitu sebesar 29,66%.

Dan dilakukan kembali pada tahun 2019 terhadap 12.773 responden di 34 provinsi dan 67 kota/kabupaten dengan mempertimbangkan gender dan strata wilayah perkotaan/perdesaan

---

<sup>33</sup>OJK 2013: Survei Pers OJK Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Literasi Keuangan

dengan kenaikan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia yaitu sebesar 38,03%.

Indeks Literasi Keuangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan di tahun 2013 sebesar 21,8%, di tahun 2016 sebesar 29,66%, dan tahun 2019 menjadi 38,03%. Dengan demikian dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 8,33%. Dengan kondisi seperti ini, ditengarai masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana mengoptimalkan uang untuk kegiatan yang produktif.<sup>34</sup>

Tujuan literasi keuangan tersebut tidak dapat tercapai dengan optimal apabila faktor faktor eksternal lainnya tidak mendukung. Faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi keberhasilan Literasi Keuangan tersebut antara lain: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per kapita, Distribusi Pendapatan, Tingkat Kemiskinan masyarakat, Tingkat pendidikan masyarakat, Komposisi penduduk yang berusia produktif, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.<sup>35</sup>

## **C. Mahasiswa**

### **1. Pengertian Mahasiswa**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Mahasiswa adalah seseorang yang belajar di perguruan tinggi, di dalam struktur

---

<sup>34</sup>OJK 2019 : *Siaran Pers Survei OJK 2019 Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Meningkat*

<sup>35</sup>OJK 2016 : *Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan*



pendidikan di Indonesia mahasiswa memegang status pendidikan tertinggi diantara yang lain.<sup>36</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.<sup>37</sup> Bagi mahasiswanya sendiri sebagai anggota Civitas di Akademika yang akan diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran diri sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Mahasiswa itu sebagaimana dimaksud sebelumnya akan secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, mencari kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan dirinya di dalam suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi seorang ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya. Mahasiswa akan memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan ahlak mulia serta dapat bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.

Menurut Siallagan (2011), mahasiswa sebagai masyarakat kampus mempunyai tugas utama yaitu belajar seperti membuat tugas, membaca buku, buat makalah, presentasi, diskusi, hadir ke seminar, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bercorak kekampusan. Di samping tugas utama, ada tugas lain yang lebih berat dan lebih

---

<sup>36</sup> KBBI “Kamus Besar Bahasa Indonesia”.  
<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Mahasiswa>, diakses pada 05 Maret 2020.

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

menyentuh terhadap makna mahasiswa itu sendiri, yaitu sebagai agen perubah dan pengontrol sosial masyarakat. Tugas inilah yang dapat menjadikan dirinya sebagai harapan bangsa, yaitu menjadi orang yang setia mencarikan solusi berbagai problem yang sedang mereka hadapi.

## 2. Peran Mahasiswa

Menurut Habib Cahyono, 2019 ada empat peran penting mahasiswa, merupakan harapan dari masyarakat yakni peran sebagai *agent of change, social control, iron stock* dan *moral force* :

### a. *Agent of Change* (Agen perubahan )

Perubahan yang dimaksud tentu perubahan kearah yang positif dan tidak menghilangkan jati diri sebagai mahasiswa dan Bangsa Indonesia. Namun untuk mengubah sebuah system, hal utama yang harus dirubah terlebih dahulu adalah diri sendiri.

### b. *Social Control* ( Kontrol Sosial )

Peran mahasiswa sebagai *social control* terjadi ketika ada hal yang tidak beres atau ganjil dalam masyarakat. Sebagai mahasiswa seharusnya menumbuhkan jiwa kepedulian social yang peduli terhadap masyarakat karena kita adalah bagian dari mereka.

### c. *Iron Stock* (Generasi Penerus yang Tangguh)

Mahasiswa dapat menjadi *Iron Stock*, yaitu mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan

generasi-generasi sebelumnya. Intinya mahasiswa itu merupakan aset, cadangan, harapan bangsa untuk masa depan.

d. *Moral Force* ( Suri Tauladan )

Mahasiswa dituntut untuk memiliki akhlak yang baik, karena mahasiswa berperan sebagai teladan di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan diperlukan agar mahasiswa memiliki intelektual dan wawasan yang luas sehingga membantu di dalam proses berpikir untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan.

Mahasiswa memiliki tingkat literasi tinggi pada aspek pengetahuan umum: keuangan pribadi, investasi, orientasi terhadap keuangan pribadi, perilaku mengorganisasi keuangan, perilaku menabung, dan perilaku pemborosan. Terliterasi baik pada aspek asuransi, cukup terliterasi pada aspek tabungan dan simpanan, filsafat utang, menilai keuangan pribadi, dan perilaku keuangan, dan terliterasi rendah pada aspek keamanan keuangan.<sup>38</sup>

Pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang utuh dan selaras, pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan-kemampuannya, sebagai bekal untuk

---

<sup>38</sup>Gina Sakinah & Bagio Mudakir, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, *Analisis Literasi Keuangan Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Angkatan 2014-2017*, (2018) JDEP Vol. 1 No. 2: Agustus, hlm 15

selanjutnya atas prskarsa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesame, maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan prbadi yang mandiri.<sup>39</sup>

Menurut Nyoman Trisna Herawati, strategis dalam meningkatkan indeks literasi keuangan di kalangan mahasiswa. Pembelajaran di perguruan tinggi sangat berperan penting dalam proses pembentukan literasi keuangan mahasiswa. Salah satunya adalah mengembangkan model pembelajaran kewirausahaan, yang memberikan pemahaman pengelolaan keuangan untuk menghasilkan lulusan yang melek keuangan. Mahasiswa yang melek keuangan atau *well financial literate* akan memiliki kecerdasan finansial untuk menata masa depan keuangan dengan lebih baik.

Mahasiswa akan memiliki tempat tersendiri di lingkungan masyarakat, mahasiswa akan menjadi suri tauladan atau panutan bagi masyarakat. Kerjasama sama saling membutuhkan (simbiosis mutualisme) membutuhkan antara penyelenggara pemerintahan dan mahasiswa dalam membangun negara menjadi program strategi nasional literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan menggunakan 3 pilar untuk mewujudkan masyarakat menjadi masyarakat yang *well literate* itu,

---

<sup>39</sup>Drs. Iskandar Wiryokusumo, Msc, Drs. J. Mandilika, Ed, *Kumpulan-Kumpulan Pemikiran dalam Pendidikan* (Jakarta: CV. Rajawali, 2004), hlm 93



dapat dilihat dari pelaksanaan program Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan menggunakan, ketiga pilar tersebut, yaitu: yang pertama, pilar edukasi dan kampanye nasional tentang literasi keuangan, yang kedua, penguatan infrastruktur literasi keuangan dan, yang ketiga pengembangan produk dan jasa keuangan.<sup>40</sup>

### 3. Profesionalitas Pada Mahasiswa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Profesionalisme adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.<sup>41</sup>

Profesionalisme merupakan paham atau keyakinan bahwa sikap dan tindakan aparatur dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan selalu didasarkan pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai profesi aparatur yang mengutamakan kepentingan publik.<sup>42</sup>

Profesionalitas lebih menggambarkan suatu keadaan derajat keprofesian seseorang dilihat pada sikap, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu profesi dituntut untuk menunjukkan kualitas dan kompetensinya.

<sup>40</sup>Amin Hidayat, *'Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan'* Purwokerto: IAIN Purwokerto", Skripsi IAIN Purwokerto (2017), hlm 68

<sup>41</sup> KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia".

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Profesionalisme>, diakses pada 05 Maret 2020.

<sup>42</sup>Agus Dwiyanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*, PT.Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2011. hlm 157

Hal itu mengandung implikasi bahwa seorang profesional yang kompeten itu harus dapat menunjukkan karakteristik utamanya<sup>43</sup>, antara lain:

- a. Mampu melakukan sesuatu pekerjaan tertentu secara rasional.

Dalam arti, ia harus memiliki visi dan misi yang jelas mengapa ia melakukan apa yang dilakukannya berdasarkan analisis kritis dan pertimbangan logis dalam membuat pilihan dan mengambil keputusan tentang apa yang dikerjakannya.

- b. Menguasai perangkat pengetahuan (teori dan konsep, prinsip dan kaidah, hipotesis dan generalisasi, data dan informasi, dan sebagainya) tentang seluk beluk apa yang menjadi bidang tugas pekerjaannya.

- c. Menguasai perangkat keterampilan (strategi dan taktik, metode dan teknik, prosedur dan mekanisme, sarana dan instrumen, dan sebagainya) tentang cara bagaimana dan dengan apa harus melakukan tugas pekerjaannya.

- d. Memahami perangkat persyaratan ambang (*basic standards*) tentang ketentuan kelayakan normatif minimal kondisi dari proses yang dapat ditoleransikan dan kriteria keberhasilan yang dapat diterima dari apa yang dilakukannya.

- e. Memiliki daya (motivasi) dan citra (aspirasi) unggulan dalam melakukan tugas pekerjaannya. Bukan sekedar puas dengan

---

<sup>43</sup> Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2012), hlm 97

memadai persyaratan minimal, melainkan berusaha mencapai yang sebaik mungkin (*profesiencies*).

- f. Memiliki kewenangan (otoritas) yang memancar atas penguasaan perangkat kompetensinya yang dalam batas tertentu dapat didemonstrasikan (*observable*) dan teruji (*measureable*), sehingga memungkinkan memperoleh pengakuan pihak berwenang (*certifiable*).

Dengan melihat pengertian diatas profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata. Di satu pihak ada tuntutan dan tantangan yang sangat berat, tetapi di lain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam rangka kepentingan masyarakat. Ciri-Ciri Profesi secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu :

1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
3. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.

4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.<sup>44</sup>

Kinerja atau performance merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan suatu referensi pada sejumlah standar seperti biaya masa lalu yang diproyeksikan dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan sebagainya.

---

<sup>44</sup>R Rizal Isnanto, *Buku Ajar Etika Profesi*, Universitas Diponegoro Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik, 2009. Hlm 11